BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri, yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.¹

Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.²

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang

---

¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm,349.

²Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

penting dan utama.³ Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi meskipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Di samping saksi yang disebutkan oleh Pasal 1 angka 26 KUHP, dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga terdapat saksi yang berasal dari tersangka/terdakwa yang diistilahkan sebagai saksi mahkota (*kroongetuige*). Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan sejak proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan.

Definisi saksi mahkota dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa “saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”.⁴

Adapun mahkota yang diberikan kepada para saksi yang dirinya berstatus sebagai terdakwa adalah dalam bentuk telah ditiadakan penuntutan terhadap

---

³Sutarto, S, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991.

⁴Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara*, Citra Aditya, Bandung, 2009, hlm.70.

suatu perkara maupun diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan, dimana apabila suatu perkaranya telah dilimpahkan ke pihak Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang dilakukannya.

Loebby Loqman berpendapat bahwa saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang umumnya terjadi dalam peristiwa penyertaan (*deelneming*). Saksi Mahkota dapat didefinisikan sebagai saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dan terdakwa tersebut diberikan mahkota.⁵

Menurut Andy Hamzah, saksi mahkota adalah seorang terdakwa pada umumnya yang telah memiliki suatu kesalahan paling ringan, yang dilantik sebagai saksi dan diberi mahkota dan kemudian tidak akan dijadikan sebagai terdakwa lagi.⁶

Saksi Mahkota dalam perkara pidana adalah saksi yang merupakan tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan untuk memberikan keterangan terhadap tersangka atau terdakwa lain dengan cara memisahkan berkas perkara.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa, kedudukan saksi mahkota dalam proses pengadilan adalah merupakan saksi yang diambil dari seorang tersangka, yaitu dimintai keterangan, pengakuan dan penjelasan pada saat melakukan tindak pidana, dan keterangan-keterangan yang lainnya.

---

⁵Loebby Loqman, Saksi Mahkota, *Varia Peradilan*, Nomor 62, Nopember 1990, hlm.2.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.15.

Istilah Saksi Mahkota tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah tersebut dikenal dalam praktik persidangan perkara pidana. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, sebenarnya istilah Saksi Mahkota ini berasal dari ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP yang menyebutkan pada pokoknya bahwa terdapat orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi dimana salah satunya adalah suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa jika dalam satu perbuatan pidana terdapat beberapa pelaku/terdakwa, maka seorang terdakwa dapat mengundurkan diri dari memberikan keterangan sebagai saksi, artinya masing-masing terdakwa memiliki status sebagai saksi dalam perbuatan pidana yang sama, saksi tersebutlah yang disebut sebagai Saksi Mahkota. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung pun juga mengakui adanya Saksi Mahkota, sebagaimana di dalam Yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menyebutkan bahwa “Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang”.

Penggunaan Saksi Mahkota (*kroongetuige*) terdapat dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yang menyatakan:

Dalam praktek, Saksi Mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.⁷

Dalam proses pengadilan, menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti, masih menjadi perdebatan sampai saat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait dengan penggunaan Saksi Mahkota ini.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan Saksi Mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrument hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrument hak asasi manusia internasional.⁸

Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali perkara-perkara pidana yang menggunakan Saksi Mahkota sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya adalah dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang dibunuh

---

⁷Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol 1, No.2, 2020, hlm.50.

⁸Amrullah, "Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol 2 No.2, 2014, hlm.97.

oleh rekannya sendiri yakni Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E atas perintah atasannya yakni Irjen Pol Ferdy Sambo yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Peristiwa pembunuhan berencana bermula pada tanggal 8 Juli tahun 2022 dimana Brigadir Joshua yang merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku utama yakni Ferdy Sambo, Brigadir Joshua dikabarkan tewas akibat baku tembak dengan Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan anggota Brimob Polri di kediaman rumah dinas Irjen Polri Ferdy Sambo pada pukul 17.00 WIB. Kasus tersebut baru dapat diungkap setelah 3 hari berselang yakni pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Terdapat skenario awal yang diceritakan yakni Brigadir Joshua di dapati masuk ke dalam kamar istri Irjen Polri Ferdy Sambo yakni ibu Putri Candrawathi dan ketahuan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap istri Irjen Polri Ferdy Sambo.

Adapun pelaku lain dalam tindak pidana tersebut adalah Putri Candrawathi, Kwat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kelima pelaku tersebut telah memberikan keterangan dan memiliki peran masing-masing. Adapun pelaku utama dalam perkara tersebut adalah Ferdy Sambo, dimana Ferdy Sambo adalah pihak yang menentukan skenario pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan melibatkan empat orang pelaku lainnya.

Berdasarkan pro kontra eksistensi penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana tersebut di atas dalam rangka pembuktian tindak pidana, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak**

**Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor:
796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan saksi mahkota sebagai alat pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencan pada Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan saksi mahkota sebagai alat pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencan pada Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi dalam bentuk sumbangsih pemikiran-pemikiran yang

membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian tindak pidana.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan saran kepada pihak yang berkepentingan atau pihak terkait di ranah hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul skripsi ini.

1. Saksi Mahkota

Secara yuridis, definisi Saksi Mahkota dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahwa: "Saksi Mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota".⁹

Saksi Mahkota dalam perkara pidana adalah saksi yang merupakan tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan untuk memberikan keterangan terhadap tersangka atau terdakwa lain dengan cara memisahkan berkas perkara. Adanya Saksi Mahkota dalam peradilan pidana karena adanya keterbatasan alat bukti

---

⁹Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu Cetakan Ke-II, Semarang, 2011, hlm. 35.

yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara pidana yang dilakukan dalam bentuk penyertaan.

2. Pembuktian

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan¹⁰.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis¹¹.

3. Tindak Pidana

Istilah “*strafbaarfeit*” digunakan untuk mengacu pada tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana sendiri merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana dan dibuat dengan kesadaran. Amir Ilyas menyatakan bahwa dalam ilmu hukum, terdapat sebuah konsep dasar yang dikenal sebagai tindak pidana, yang

---

¹⁰R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta. Pradnya Paramita. 2008, hlm.1.

¹¹Firdaus, Achmad S., Gousta Feriza. “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”, *Lex Journalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm.223.

merupakan istilah yang diciptakan dengan sengaja untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹²

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.¹³

Berdasarkan kerangka konsep di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini terbatas pada penelitian yang fokus membahas mengenai kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

F. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti daripada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, maka aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.¹⁴

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian pembuktian adalah sebagai berikut:

---

¹²Kudadari, E., Najemi, A., & Erwin, E. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 4, No. 1, 2021, hlm.3.

¹³Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 111.

¹⁴Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.43.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁵

Pembuktian merupakan bagian penting dalam mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental (*civil law*) yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti yang sah dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa.

Di dalam suatu proses peradilan, untuk menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudah, karena dalam prosesnya sering terjadi kekurangan dan tidak lengkapnya suatu alat bukti ataupun saksi.¹⁶

Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapat sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sehingga hukuman bagi terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

---

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadil, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273.

¹⁶Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar & Tri Imam Munandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan*, *PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 4 Nomor 1*, 2023, hlm. 17.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa “pembuktian” adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran dalam perkara pidana untuk meyakinkan hakim guna menemukan kebenaran materiil yang diharapkan.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, saksi adalah salah satu kunci untuk memperoleh kebenaran materiil, yang merupakan kebenaran yang benar benar terjadi. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁷

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁸

Teori keadilan menurut ahli hukum:

---

¹⁷Ahmad Dahlan, Usman & Herry Liyus, “Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2, No. 1*, 2021, hlm. 2.

¹⁸Manullang E.Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 57.

a. Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bneat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- 2) Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

b. Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adi!” hanya kata lain dari “benar”.¹⁹

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem*

---

¹⁹Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

laedere), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam. Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

Adapun salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dimaksud adalah dengan menggerakkan sistem peradilan pidana. Bergeraknya sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelitian dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis pada beberapa buku, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, mencari beberapa judul terkait kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam penegeakan hukum pidana formil di Indonesia, ditemukan hasil telaah pustaka sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan

---

²⁰Nys. Arfa, Syofyan Nur & Tri Imam Munandar, “Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 102.

(Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)” oleh Darwin Ricardo, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018. Perbedaannya terletak dalam objek pembahasannya yang dapat dilihat dari putusan pengadilan dalam wilayah hukum yang berbeda, walaupun membahas tentang saksi mahkota, namun permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut berkaitan dengan kekuatan pembuktian berbeda dengan penulis yaitu terkait kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian.

2. Penelitian yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan” oleh Eko Condro Saputro, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Fokus permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pemanfaatan saksi mahkota dalam perspektif Hak asasi Manusia (HAM), kendala penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan di persidangan, walaupun sama-sama bersifat kasuistik yaitu dilakukan terhadap tindak pidana pembunuhan, namun penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan penulis yaitu penelitian penggunaan saksi mahkota dan kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian.
3. Penelitian yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana” oleh Zulfan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005. Fokus permasalahan yang dikaji urgensi dan akibat hukum penggunaan saksi mahkota, kriteria saksi mahkota sebagai alat bukti menurut KUHAP, keberadaan hak asasi manusia dalam sistem pembuktian perkara pidana menggunakan saksi

mahkota, pembahasan yang dilakukan konsep dan teori yang masih umum, melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan yang dilakukan penulis lebih spesifik dan kasuistik yang memuat lebih banyak fakta hukum terkait saksi mahkota berdasarkan fakta yang dinamis dan kekinian.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu di atas, penulis menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam penegakan hukum pidana formil di Indonesia merupakan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari segi objek permasalahan yang diangkat oleh peneliti menggunakan rumusan masalah, tempat penelitian yang berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang menitikberatkan pada penjelasan atau eksplanasi asas hukum, yaitu asas hukum, konsep hukum tentang Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, jenis penelitian ini beranjak dari telaah hukum positif, berobjekan pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis khususnya tentang Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seluruh cara atau kegiatan dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) yakni dengan menelaah serta mengkaji suatu undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas, pendekatan peraturan perundang-undangan dapat membantu dalam menganalisa permasalahan yang ada.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni penulis mengacu pada prinsip hukum yang dijadikan pijakan dalam membangun argumen hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*case law approach*) yaitu kasus Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam buku penelitian hukum karangan Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Jenis dan sumber bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2. Putusan Mahkamah Agung No.1986 K/Pid.Sus/1989
3. Putusan Mahkamah Agung No.2437 K/Pid.Sus/2011
4. Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B69/E/02/1997

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dapat dipergunakan oleh penulis seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota, Pembuktian dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Bab ini menjelaskan tentang pengertian saksi mahkota, dasar hukum saksi mahkota, syarat-syarat saksi mahkota, pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian, teori-teori tentang pembuktian, pengertian pembunuhan berencana, unsur-unsur pembunuhan berencana dan pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB III Pembahasan. Bab pembahasan mengenai bagaimana pengaturan saksi mahkota sebagai alat pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

BAB IV Penutup. Memuat 2 (dua) sub bab, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.